



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan : putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

Penggugat, umur tahun 27, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP tempat kediaman di kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pangkas rambut, pendidikan SD, tempat kediaman Kota Semarang, sebagai Tergugat;

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ❖ Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1295/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 21 September 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut

1. Pada tanggal 03 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan berdasarkan Akta Nikah Nomor: Tanggal 05 November 2012;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang tua Penggugat di Kabupaten Bangkalan Kabupaten Bangkalan selama kurang lebih 4 Tahun kemudian pindah ke rumah kosan di Semarang Utara selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun dan sudah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat meninggalkan Penggugat untuk merantau dan bekerja di Semarang Utara sebagai pangkas rambut;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib selama kurang lebih 7 Bulan sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, Pengugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat tidak perhatian kepada Pengggat, Tergugat sudah 7 Bulan tidak pulang ke rumah dan tidak memberi kabar walaupun sudah dikirim pesan dan menelepon Tergugat padahal nomornya serta akun sosial medianya aktif;
 4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia;
 5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak february 2020 (selama kurang lebih 7 Bulan);
 6. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, : selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana berikut

Primair:

1. ;Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;



Subsida;

mohon putusan yang seadil- ;adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir karena relaas tidak patut;

Menimbang bahwa, relaas yang disampaikan kepada Tergugat yang isinya menyatakan bahwa Tergugat tidak dikenal sedangkan Penggugat tidak tahu alamatnya yang jelas dan pasti, oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, sesuai dengan relaas yang disampaikan kepada Tergugat yang isinya menyatakan bahwa Tergugat tidak dikenal sedangkan Penggugat tidak tahu alamatnya yang jelas dan pasti, oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dpanggil secara patut, maka berdasarkan Pasal 271 Rv permohonan Penggugat mencabut gugatannya dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.Bkl. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi , bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah ,oleh kami **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.** sebagai Ketua Majelis , **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** dan **Nirwana , S.HI.** masing , - , masing sebagai **Hakim Anggota** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 , November 2020 Masehi , bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah ,oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. , sebagai **Panitera Penggantiserta** dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri .Tergugat

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.

Hakim Anggota I ,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota II ,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwana, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30 :.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.75 .000,-
3. Biaya Panggilan	.Rp :475.000,-
4. Biaya Redaksi	.Rp. 10 :000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6 :.000,-</u>
Jumlah	.Rp :60.6000,-

) enam ratus enam ribu rupiah(

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)